Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi IV
Minggu ke-5 Januari
(26 Januari s.d. 1 Februari 2026)
2026

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

HARI PRIMATA INDONESIA: REFLEKSI PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN BIODIVERSITAS

Rahmat Sawalman
Analis Legislatif Ahli Pertama
rahmat.sawalman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hari Primata Indonesia yang diperingati setiap tanggal 30 Januari merupakan bentuk kepedulian terhadap kelangsungan hidup primata dan habitatnya. Peringatan ini diinisiasi oleh Protection of Forest and Fauna (PROFAUNA) Indonesia sejak tahun 2014, yang berawal dari keprihatinan terhadap maraknya perdagangan ilegal dan perburuan primata. Pemilihan tanggal tersebut didasari oleh kampanye *Primate Freedom Tour* pada Januari 2001 oleh PROFAUNA Indonesia di beberapa kota di Pulau Jawa dan Bali untuk pelindungan primata Indonesia. Peringatan Hari Primata Indonesia merupakan momentum reflektif dan strategis untuk memperkuat komitmen nasional dalam pelestarian biodiversitas.

Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman primata dunia. Kekayaan ini merupakan aset ekologis, sosial, dan ekonomi yang bernilai tinggi. Namun, data menunjukkan bahwa kekayaan hayati tersebut berada dalam posisi yang semakin rentan. Data dari International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa sebagian besar spesies dari sekitar 66 jenis primata di Indonesia berada dalam kategori terancam. Sebanyak 12 spesies berstatus kritis (*critically endangered*), 25 spesies terancam (*endangered)*, dan 26 spesies rentan (*vulnerable*). Beberapa spesies yang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat, di antaranya Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Owa Simakobu (*Simias concolor*), Lutung Sentarum (*Presbytis chrysomelas*), dan Tarsius Sangihe (*Tarsius sangirensis*).

Tekanan terbesar dalam menjaga kelangsungan hidup primata di antaranya berasal dari deforestasi, alih fungsi lahan, fragmentasi habitat, perburuan, serta perdagangan satwa liar ilegal. Alih fungsi lahan mengancam ruang hidup alami primata. Fragmentasi hutan berisiko mengisolasi populasi, mengurangi keanekaragaman genetik, dan meningkatkan risiko kepunahan lokal. Praktik perburuan dan perdagangan ilegal berdampak pada percepatan penurunan populasi di alam liar. Tekanan tersebut diperparah oleh dampak perubahan iklim, kebakaran hutan, dan lemahnya penegakan hukum sehingga secara kumulatif mengancam keberlanjutan primata sebagai bagian penting dari ekosistem hutan Indonesia.

Primata memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan tropis. Mereka adalah pemakan buah (frugivora) yang berperan besar dalam penyebaran biji (*seed disperser*) tanaman di hutan guna mendukung regenerasi vegetasi dan keragaman spesies. Tanpa keberadaan mereka, beberapa jenis pohon besar yang bergantung pada penyebaran biji oleh primata ini bisa hilang dari ekosistem.

Selain itu, primata juga berperan dalam mengendalikan populasi serangga, menjaga siklus hara tanah, serta menjadi indikator kesehatan ekosistem. Keberadaan populasi primata yang stabil mencerminkan kualitas lingkungan yang baik. Sebaliknya, penurunan populasi primata merupakan sinyal dini terjadinya degradasi lingkungan. Dengan demikian, pelestarian primata sejatinya merupakan bagian integral dari upaya menjaga daya dukung lingkungan hidup bagi manusia.

Upaya konservasi primata Indonesia perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis. *Pertama,* memperkuat pelindungan dan restorasi habitat alami dengan menahan laju deforestasi, memperluas kawasan konservasi, serta merehabilitasi hutan yang terdegradasi sebagai ruang hidup utama primata. *Kedua*, meningkatkan penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal melalui pengawasan terpadu, penerapan sanksi tegas, serta kerja sama lintas lembaga dan internasional. *Ketiga*, mengembangkan konservasi berbasis masyarakat dengan mendorong partisipasi lokal melalui ekowisata berkelanjutan, agroforestri ramah lingkungan, dan insentif ekonomi hijau guna mengurangi ketergantungan pada eksploitasi hutan. *Keempat*, memperkuat riset ilmiah, pemantauan populasi, serta mitigasi konflik manusia-primata berbasis sains untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. *Kelima*, meningkatkan edukasi publik dan literasi lingkungan melalui kurikulum, kampanye media, dan gerakan sosial agar terbentuk kesadaran kolektif dalam melindungi primata. Seluruh langkah tersebut perlu disinergikan dalam kerangka kolaborasi multipihak, sehingga peringatan Hari Primata Indonesia bukan hanya simbolisme, namun juga menjadi momentum reflektif dalam menjaga kelestarian primata dan habitatnya secara berkelanjutan.

Atensi DPR

Pelestarian primata tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap satwa liar, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan RI memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan terkait pelindungan dan pelestarian primata serta habitatnya dilaksanakan secara komprehensif, adaptif terhadap tantangan ekologis, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu mendorong peningkatan alokasi pembiayaan yang memadai bagi pelindungan kawasan konservasi, rehabilitasi habitat, penguatan pusat rehabilitasi satwa, riset ilmiah, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik dan eksploitasi ilegal. Selain itu, dalam fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan konservasi, efektivitas penegakan hukum, pengelolaan kawasan hutan, serta kinerja kementerian dan *stakeholder* terkait guna memastikan seluruh program pelindungan primata berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi keberlanjutan biodiversitas nasional.

Sumber

antaranews.com, 31 Januari 2026;
detik.com, 31 Januari 2026;
pusdiklat.bp2sdm.kehutanan.go.id, 30 Januari 2026;
rri.co.id, 29 dan 30 Januari 2026;
tribunnews.com, 31 Januari 2026; dan
worldwildlife.org, 31 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Prayudi, Ahmad Budiman, Novianti, Rachmi Suprihartanti S.
Ekkuinbang Sony Hendra P., Rafika Sari, Rasbin, Venti Eka Satya, Hilma Meilani, Niken Paramita P.
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Nur Sholikah P.S.

LAYOUTER
Devindra R. Oktaviano, Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Rahmat Sawalman, Fitria Melinda, Muhammad Zakik A., Fadila Puti Lenggo G., Yiyis Aldi Mebra, Anugrah Juwita Sari, Timothy Joseph S. G., Eva Mutia Ghofarany, Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making